

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Informasi Umum

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karuniaNya sehingga pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis AkruaI untuk tahun yang ke 10 sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka SKPD Biro Umum termasuk salah satu unsur dalam menunjang kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam bidang peningkatan pelayanan publik yang dalam penyelenggaraanya Biro Umum didukung dana yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang didalamnya memuat Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur pada Biro Umum.

Untuk tahun 2024-2026 Visi Biro Umum adalah; "Menjadi Biro yang Handal dibidang Pelayanan Pimpinan dan Kesekretariatan". Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, akan diemban Misi dibawah ini :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

Misi ini diarahkan kepada pemenuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas baik dan sesuai standarisasi. Sarana dan prasarana adalah modal dasar bagi Biro Umum dalam melayani kebutuhan pimpinan dan sekretariat yang membutuhkan berbagai macam fasilitas-fasilitas.Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan pimpinan dan kesekretariatan.

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan pimpinan dan kesekretariatan.

Misi ini diarahkan kepada peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan pimpinan dan kesekretariatan melalui upaya mewujudkan pengelolaan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas serta mewujudkan pelayanan pimpinan dan administrasi yang prima.

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan Pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## **1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif. Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2024. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **1.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2024 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
- b. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ) ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara ;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventerisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- q. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014:
- r. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- s. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

## **1.2. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2024 meliputi hal-hal berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

**BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET**

**KINERJA APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

**BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

**BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

**BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.1.1. Pendapatan LRA
  - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
  - 5.2.1. Aset
  - 5.2.2. Kewajiban
  - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
  - 5.3.1. Pendapatan LO
  - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

**BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

**BAB VII. PENUTUP**

**BAB II**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN  
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1. Ekonomi Makro**

Kebijakan Umum APBD tiap tahunnya yang telah ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang penyusunan APBD tahun yang bersangkutan didasari pada asumsi makro ekonomi regional Provinsi Sumatera Barat yang memuat informasi tentang kondisi daerah dan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan target pertumbuhan yang diperkirakan ingin dicapai. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Arah kebijakan Biro Umum Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Kinerja Pelayanan Tamu dan Pimpinan serta Pelayanan Administrasi Keuangan Setda”

**2.2. Kebijakan Keuangan**

**2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah**

Kebijakan Pendapatan Daerah pada tahun 2024, diarahkan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta peningkatan dana perimbangan terutama untuk membiayai penyelenggaraan peralihan beberapa sub urusan dari kewenangan kabupaten dan kota menjadi wewenang provinsi sebagai pencerminan dari kesungguhan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan sumber-sumber potensi daerah dan dana perimbangan untuk mewujudkan otonomi yang didasarkan pada penggunaan keuangan daerah.

Pada Biro Umum Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Penyewaan Tanah dan Bangunan (Pemakaian Aula Istana Bung Hatta Bukittinggi, Aula dan kamar Mess Bukit Lampu).

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada :

- **Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui:**
  1. Perubahan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha.
  2. Meningkatkan sarana dan prasarana Gedung/Aula dan Tempat penginapan/pesanggrahan/villa, serta mengupayakan peningkatan pelayanan.
  3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai sumber-sumber penerimaan daerah.

Pada APBD Tahun 2024 Pendapatan pada Biro Umum Sekretariat Daerah ditargetkan sebesar Rp. 580.533.371,00 sedangkan realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 377.100.000,00.

### 2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah berdasarkan kelompok belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi merupakan belanja pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun yang termasuk jenis Belanja Operasi adalah belanja pegawai (gaji dan tunjangan) dan belanja barang dan jasa.

Pada tahun 2024, Belanja Daerah Biro Umum Sekretariat Daerah didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dengan total anggaran (APBD Perubahan) sebesar Rp. 140.576.048.296,00. Rincian dari Belanja tersebut adalah Belanja Operasi yang dialokasikan sebesar Rp. 117.048.313.256,00 digunakan untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan dan tunjangan tambahan penghasilan PNS) pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 62.858.145.559,00 serta belanja barang dan jasa sebesar Rp. 54.190.167.697,00. Sedangkan Belanja Modal yaitu jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Adapun anggaran Belanja Modal Biro Umum Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp. 23.527.735.040,00 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Besarnya alokasi anggaran untuk masing-masing Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran ( Rp )
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.478.100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.888.757.104,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	549.473.318,00
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	32.364.561,00
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	489.412.587,00
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.381.099.395,00
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.175.449.571,00
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.871.459.008,00
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.691.087.241,00
10	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.724.431.705,00

11	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	19.614.035.706,00
	<b>Jumlah</b>	<b>140.576.048.296,00</b>

**2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD**

Mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Biro Umum dan program prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2024-2026 serta penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran OPD yang telah dirumuskan, maka Biro Umum merumuskan 1 (satu) program, yang terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan.

Untuk dapat mengimplementasikan visi - misi, yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka dalam lima tahun ke depan program dan kegiatan yang direncanakan untuk mewujudkan sasaran strategis, meliputi:

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Pencapaian Target kinerja
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD, terlaksananya evaluasi dokumen SKPD, tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja, Renja Perubahan yang disusun sebanyak 8 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan sebanyak 17 Laporan
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 19 Laporan
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 330 orang/bulan
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 250 Dokumen

	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD sebanyak 24 Laporan
<b>III</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah
	7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 2 Dokumen
	8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 8 Laporan
<b>IV</b>		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengadministrasian Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
	9	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah sebanyak 12 Dokumen
<b>V</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
	10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 2 Paket
	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 50 orang
<b>VI</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 50 Paket
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 50 Paket
	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan 60 Paket

	15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan 8 Paket
	16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 3 Paket
	17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 3 Dokumen
	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 Laporan
	19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebanyak 3 Dokumen
<b>VII</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah
	20	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan sebanyak 602 Paket
	21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan sebanyak 50 Unit
<b>VIII</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 Laporan
	23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 Laporan
	24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan sebanyak 12 Laporan
	25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan sebanyak 12 Laporan

IX	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik Daerah
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 5 unit
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 40 unit
28	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara 20 unit
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 150 unit
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehab 10 unit
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehab sebanyak 5 Unit
<b>X</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
32	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH sebanyak 2 Orang/bulan
33	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan sebanyak 50 Paket
34	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up KDH dan WKDH sebanyak 2 Orang
35	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH sebanyak 2 Orang/Bulan

XI		<b>Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah</b>	Terfasilitasinya Rumah Tangga KDH/WKDH dan Sekretariat Daerah
	36	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan sebanyak 25 Paket
	37	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan 25 Paket
	38	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan sebanyak 25 Paket

**B A B III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Keuangan**

Dalam Tahun Anggaran 2024, Unit Kerja Biro Umum pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menargetkan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp. 580.533.371,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan Belanja Daerah untuk Unit Kerja Biro Umum pada SKPD Sekretariat Daerah sejumlah Rp.140.576.048.296,00 direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Operasional Rp 117.048.313.256,00
- Belanja Modal Rp. 23.527.735.040,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Pendapatan**

Secara rinci capaian perolehan pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2024 jika dibanding dengan realisasi anggaran tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan Tahun 2024**

A	PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Lebih/Kurang
I	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>580.533.371,00</b>	<b>377.100.000,00</b>	<b>64,96</b>	<b>267.950.000,00</b>
1	Retribusi Daerah	580.533.371,00	377.100.000,00	64,96	267.950.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	580.533.371,00	377.100.000,00	64,96	267.950.000,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	580.533.371,00	377.100.000,00	64,96	267.950.000,00
4	Retribusi Pemakaian Ruangan	580.533.371,00	377.100.000,00	64,96	267.950.000,00
	- Retribusi Sewa Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00	3.200.000,00
	- Retribusi Sewa Pemakaian Aula Istana Bung Hatta (Besar/Kecil)	552.933.371,00	341.000.000,00	61,67	254.250.000,00
	- Retribusi Sewa Pemakaian Aula Kantor Gubernur	-	-	-	-
	- Retribusi Sewa Pemakaian Aula Mess Bukit Lampu	14.000.000,00	22.500.000,00	160,71	10.500.000,00

Pada Tabel diatas terlihat realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 sebesar Rp. 377.100.000,00 kurang dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 580.533.371,00 atau sebesar 64,96%. Pendapatan Retribusi Daerah yang terealisasi sebesar Rp. 377.100.000,00 terdiri dari Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi Pemakaian Ruangan.

**Belanja Daerah**

Belanja Daerah pada DPA Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan sebesar Rp. **140.576.048.296,00** dengan realisasi sebesar Rp. **132.679.311.639,00** dengan persentase mencapai **94,38 %** terdiri dari :

- **Belanja Operasi** yaitu sebesar Rp. 117.048.313.256,00 realisasi sebesar Rp. 110.257.084.789,00 dengan persentase mencapai 94,20 %. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- **Belanja Modal** dianggarkan sebesar Rp. 23.527.735.040,00 dari anggaran kegiatan tersebut yang dapat direalisasikan sebesar Rp 22.422.226.850,00 dengan pencapaian 95,30 %.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian Belanja Daerah dan pengeluaran Unit Kerja Biro Umum dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal yang dapat diuraikan sbb:

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
	<b>BELANJA</b>	<b>140.576.048.296,00</b>	<b>132.679.311.639,00</b>	<b>94,38</b>	<b>122.906.839.705,00</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>117.048.313.256,00</b>	<b>110.257.084.789,00</b>	<b>94,20</b>	<b>112.358.473.753,00</b>
1	Belanja Pegawai	62.858.145.559,00	58.656.948.405,00	93,32	56.504.655.204,00
2	Belanja Barang dan Jasa	54.190.167.697,00	51.600.136.384,00	95,22	55.853.818.549,00
<b>II</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>23.527.735.040,00</b>	<b>22.422.226.850,00</b>	<b>95,30</b>	<b>10.548.365.952,00</b>
1	Belanja Peralatan dan Mesin	16.407.411.365,00	15.491.721.013,00	94,42	6.614.034.675,00
2	Belanja Gedung dan Bangunan	7.061.065.675,00	6.887.606.581,00	97,54	3.884.396.887,00
3	Belanja Aset Tetap Lainnya	59.258.000,00	42.899.256,00	72,39	49.934.390,00

Pencapaian realisasi keuangan atas kegiatan dan sub kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Biro Umum Sekretariat Daerah pada tahun adalah sebagai berikut:

NO	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>140.576.048.296,00</b>	<b>132.679.311.639,00</b>	<b>94,38</b>	<b>7.902.492.418,00</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>158.478.100,00</b>	<b>151.395.550,00</b>	<b>95,53</b>	<b>7.082.550,00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.476.300,00	70.835.300,00	95,11	3.641.000,00

	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.922.800,00	46.185.350,00	94,40	2.737.450,00
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.079.000,00	34.374.900,00	97,99	704.100,00
<b>II</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>58.888.757.104,00</b>	<b>54.678.118.318,00</b>	<b>92,85</b>	<b>4.210.638.786,00</b>
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.226.493.604,00	54.035.792.976,00	92,80	4.190.700.628,00
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	564.839.500,00	558.774.300,00	98,93	6.065.200,00
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	97.424.000,00	83.551.042,00	85,76	13.872.958,00
<b>III</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>549.473.318,00</b>	<b>537.383.964,00</b>	<b>97,80</b>	<b>12.089.354,00</b>
	7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	444.747.149,00	439.851.811,00	98,90	4.895.338,00
	8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	104.726.169,00	97.532.153,00	93,13	7.194.016,00
<b>IV</b>		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>32.364.561,00</b>	<b>30.309.775,00</b>	<b>93,65</b>	<b>2.054.786,00</b>
	9	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	32.364.561,00	30.309.775,00	93,65	2.054.786,00
<b>V</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>489.412.587,00</b>	<b>457.400.400,00</b>	<b>93,46</b>	<b>32.012.187,00</b>
	10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	437.500.000,00	405.641.800,00	92,72	31.858.200,00
	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.912.587,00	51.758.600,00	99,70	153.987,00
<b>VI</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6.381.099.395,00</b>	<b>6.241.113.666,00</b>	<b>97,81</b>	<b>139.985.729,00</b>

	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	94.133.800,00	94.133.800,00	100,00	-
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	685.796.900,00	673.307.150,00	98,18	12.489.750,00
	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.066.880.270,00	1.052.513.340,00	98,65	14.366.930,00
	15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	703.337.000,00	689.125.400,00	97,98	14.211.600,00
	16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	179.109.500,00	173.429.000,00	96,83	5.680.500,00
	17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.058.000,00	33.699.256,00	67,32	16.358.744,00
	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.564.702.593,00	3.496.032.320,00	98,07	68.670.273,00
	19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37.081.332,00	28.873.400,00	77,87	8.207.932,00
<b>VII</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>15.175.449.571,00</b>	<b>14.327.367.623,00</b>	<b>94,41</b>	<b>848.081.948,00</b>
	20	Pengadaan Mebel	2.330.518.436,00	2.165.174.300,00	92,91	165.344.136,00
	21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.844.931.135,00	12.162.193.323,00	94,68	682.737.812,00
<b>VIII</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>19.871.459.008,00</b>	<b>18.623.416.584,00</b>	<b>93,72</b>	<b>1.248.042.424,00</b>
	22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.269.500,00	50.256.200,00	89,31	6.013.300,00
	23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.442.027.960,00	3.916.954.288,00	88,18	525.073.672,00
	24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.450.687.000,00	1.386.323.470,00	95,56	64.363.530,00
	25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.922.474.548,00	13.269.882.626,00	95,31	652.591.922,00
<b>VIII</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14.691.087.241,00</b>	<b>13.910.453.591,00</b>	<b>94,65</b>	<b>786.389.411,00</b>

	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.982.000,00	190.765.793,00	82,59	40.216.207,00
	27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.827.566.141,00	1.661.209.492,00	90,90	166.356.649,00
	28	Pemeliharaan Mebel	39.375.000,00	29.500.000,00	74,92	9.875.000,00
	29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.191.799,00	165.890.705,00	81,64	37.301.094,00
	30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.950.842.301,00	11.505.533.921,00	96,27	445.308.380,00
	31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	439.130.000,00	357.553.680,00	81,42	81.576.320,00
<b>X</b>		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>4.724.431.705,00</b>	<b>4.637.822.029,00</b>	<b>98,17</b>	<b>86.609.676,00</b>
	32	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	252.244.496,00	245.637.970,00	97,38	6.606.526,00
	33	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	343.739.750,00	343.736.600,00	100,00	3.150,00
	34	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
	35	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.048.447.459,00	4.048.447.459,00	100,00	-
<b>XI</b>		<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>19.614.035.706,00</b>	<b>19.084.530.139,00</b>	<b>98,50</b>	<b>529.505.567,00</b>
	36	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	8.997.039.494,00	8.727.724.192,00	97,01	269.315.302,00

37	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	7.501.557.040,00	7.288.149.880,00	97,16	213.407.160,00
38	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3.115.439.172,00	3.068.656.067,00	98,50	46.783.105,00

**3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Dalam pencapaian target keuangan maupun target fisik secara keseluruhan tidak terdapat hambatan maupun kendala yang berarti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dimana secara keseluruhan telah sesuai dengan yang ditetapkan. Terdapat beberapa kegiatan yang sudah terlaksana 100 % namun dalam realisasi keuangan kurang dibawah 90 %. Ini menunjukkan bahwa dalam pemakaian anggaran telah mempertimbangkan prinsip 3 E ( Efisiensi, Efektifitas dan Ekonomis).

Kegiatan yang dalam realisasi keuangannya masih di bawah 90 % adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, realisasi keuangan 85,76%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah acara rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga terjadi penghematan perjalanan dinas dan BBM.
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, realisasi keuangan 67,31 % dikarenakan disesuaikan dengan permintaan Pimpinan (KDH,WKDH dan Sekda).
3. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, realisasi keuangan 77,87 % dikarenakan penatausahaan arsip dinamis di unit kerja Istana Bung Hatta yang seharusnya dilaksanakan tahun 2024 diundur menjadi awal tahun 2025 karena menyesuaikan dengan jadwal personel dari Dinas Arsip dan Pustaka.
4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi keuangan 89,31 % dikarenakan telah adanya aplikasi Srikandi untuk efisiensi kegiatan surat menyurat.
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi keuangan 88,18 % dikarenakan biaya penambahan daya listrik tidak semahal yang diperkirakan.
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, realisasi keuangan 82,59% dikarenakan sudah disesuaikan dengan biaya kerusakan kendaraan dinas jabatan KDH/WKDH dan Sekda..
7. Pemeliharaan Mebel, realisasi keuangan 74,92 % dikarenakan sudah sesuai dengan laporan kerusakan mebel.
8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi keuangan 81,64 %, dikarenakan sudah sesuai dengan laporan kerusakan peralatan dan mesin lainnya.
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi keuangan 81,42% dikarenakan sudah sesuai dengan laporan kerusakan sarana dan prasarana Gedung Kantor.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan umum kebijakan akuntansi adalah mengatur penyajian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode. Sedangkan tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi penyusunan laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, dan memberikan pendapat serta menafsirkan informasi apakah Laporan Keuangan sudah disajikan/disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi;

- a. Tujuan kebijakan akuntansi, definisi dan pengertian;
- b. Lingkungan akuntansi pemerintah daerah;
- c. Pengguna dan kebutuhan informasi pengguna;
- d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
- e. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum;
- f. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip serta kendala informasi akuntansi;
- g. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya;
- h. Jenis, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur laporan keuangan.

**4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

#### **4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis akrual**. Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

##### **Pengukuran/Penilaian Aset**

##### **a. Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

##### **b. Piutang**

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi

pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

**c. Investasi Jangka Pendek**

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

a. Investasi dalam bentuk surat berharga :

1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

**d. Persediaan disajikan sebesar :**

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar.

**e. Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

**f. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris,

dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

**g. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai, biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

**h. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

**i. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

**j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi**

Berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

**4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Kebijakan akuntansi yang ditetapkan masing-masing daerah biasanya disusun sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Kebijakan Akuntansi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Ada beberapa Kebijakan Akuntansi, antara lain :

**a. Pendapatan - LRA**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu SKPD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu di bayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Pengakuan Pendapatan – LRA :**

- Diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu SKPD
- Diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara

**Penyajian Pendapatan – LRA disajikan** pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

**Pengungkapan Pendapatan – LRA** diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah :

- Pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
- Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus
- Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah
- Informasi lainnya yang dianggap perlu

**b. Pendapatan – LO**

Pendapatan – LO adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu di bayar kembali.

Klasifikasi Pendapatan – LO berdasarkan sumbernya;

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer – LO
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Syah – LO
4. Surplus Non Operasional – LO

5. Pendapatan Luar Biasa - LO

**Pengakuan Pendapatan – LO** diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai ataupun masih piutang.

- Kebijakan akuntansi Pendapatan – LO meliputi kebijakan akuntansi Pendapatan – LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan - LO untuk SKPD
- Akuntansi Pendapatan – LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional
- Akuntansi Pendapatan – LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- Pengakuan Pendapatan – LO pada SKPD, yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.
- Pengakuan Pendapatan – LO pada SKPD dapat dibagi menjadi 4, yaitu ;
  1. Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan.
  2. Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak dan dilanjutkan dengan pembayaran dengan wajib pajak.
  3. Kelompok pendapatan retribusi yang pendapatannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan
  4. Kelompok Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah yaitu Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat dan Pendapatan BLUD.

**Penyajian** Pendapatan – LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS

**Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK** terkait dengan pendapatan – LO :

- Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah berakhirnya tahun anggaran
- Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus terhadap kenaikan / penurunan yang sangat signifikan.

c. Belanja

**Belanja merupakan** semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi.

Klasifikasi belanja dirinci berdasarkan objek :

1. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai, merupakan belanja dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Belanja Barang, merupakan pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

- Belanja Bunga, merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah : biaya commitment fee dan biaya denda.
  - Belanja Subsidi, merupakan belanja bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak dan dirinci menurut objek dan rincian objek belanja subsidi kepada BUMN/BUMD dan pihak ketiga lainnya.
  - Belanja Hibah, merupakan pemberian uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
  - Belanja Bantuan Sosial, merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dan bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan dirinci menurut objek belanja bantuan sosial.
2. **Belanja Modal** merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal, dan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
3. **Belanja Tak Terduga**, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah dan pengembalian pendapatan yang telah dicatat sebagai pendapatan tahun lalu.
4. **Belanja Transfer**,
- a. **Transfer Bagi Hasil Pajak**,
    - a.1. **Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah** merupakan Pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek dan rincian objek belanja transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kab/Kota.
    - a.2. **Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya** merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
  - b. **Transfer Bantuan Keuangan**,
    - b.1. Belanja transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kab/Kota, dan kepada pemerintah daerah kota lainnya dalam rangka pemerataan.

b.2. Belanja transfer bantuan keuangan ke Desa merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan.

b.3. Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan lainnya dari provinsi kepada pihak ketiga dalam rangka pemerataan.

d. Beban

Beban adalah Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi Beban Berdasarkan Objek :

1. Beban Pegawai adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya kepada ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dirinci menurut objek belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya, pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, belanja pemungutan PBB, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Uang Lembur dan Belanja Pegawai (BLUD) serta objek sejenis lainnya.
2. Beban Barang dan Jasa adalah Penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu dengan suatu prestasi.
3. Beban Bunga merupakan alokasi beban untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah daerah, seperti biaya commitment fee, Beban Bunga Utang dan Obligasi.
4. Beban Subsidi adalah beban Pemerintah Daerah yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk / jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
5. Beban Hibah merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
6. Beban Bantuan Sosial adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang dan jasa kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi sistimatis atas nilai suatu aset tetap dan aset lainnya yang dapat disusutkan selama masa manfaat dan objek sejenis lainnya.
8. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
9. Beban Lain-lain merupakan beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang

sifatnya tidak biasanya dan tidak diharapkan berulang atau untuk menampung koreksi kesalahan atas beban yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan.

10. Beban Transfer, ada 5 macam yaitu : Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

Beban diakui pada saat :

1. Timbulnya kewajiban
2. Terjadinya konsumsi aset
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

- e. Pembiayaan ( Financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengakuan Pembiayaan ;

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengungkapan pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam LRA dan lebih lanjut diungkapkan dalam CaLK .

- f. Kas dan Setara Kas

Paragraf 8 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan Setara Kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan / bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara penerimaan /bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/Rekening Kas Umum Daerah.

Kas diukur / dicatat sebesar nilai nominal, yang disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

- g. Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain dan/atau pihak ketiga atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Klasifikasi piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas :

1. Piutang Karena Pungutan, terdiri atas :
  - a. Piutang Pajak Daerah
  - b. Piutang Retribusi
  - c. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya
    - Piutang Pajak ;
      1. Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB)
      2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok
    - Piutang Retribusi, diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi dan naskah perjanjian sewa menyewa.
    - Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, diakui pada akhir tahun berdasarkan dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal akhir tahun belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen.
    - Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah
2. Piutang Karena Transfer, terdiri dari :
  - a. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam
  - b. Piutang Dana Alokasi Umum( DAU)
  - c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - d. Piutang Dana Otonomi Khusus ( Otsus)
  - e. Piutang Tansfer Lainnya
  - f. Transfer Antar Daerah
  - g. Piutang Kelebihan Transfer
3. Piutang Karena Ganti Kerugian Daerah, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan / SKTJM, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
4. Piutang Karena Perikatan
  - a. Pemberian Pinjaman
  - b. Jual Beli
  - c. Kemitraan
  - d. Pemberian Fasilitas / Jasa
5. Penyisihan Piutang

Penghapus-bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus-bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

- h. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- i. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- j. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 ( dua belas ) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- k. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- l. Aset Lainnya dan Amortisasi merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga ( kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- m. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa
- n. Koreksi Kesalahan dan Perubahan Kebijakan Akuntansi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- o. Penyajian Kembali (Restatement) Neraca adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula dari semula basis Kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.
- p. Penyajian Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>580.533.371,00</b>	<b>377.100.000,00</b>	<b>64,96</b>	<b>267.950.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Untuk realisasi Tahun 2024 mencapai 64,96 % dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp 109.150.000,00. Dilihat dari capaian target secara keseluruhan penerimaan retribusi kurang dari target, hal ini disebabkan karena penetapan target retribusi untuk tahun 2024 terlalu tinggi. Dari tiga objek retribusi aula Istana Bung Hatta tidak mencapai target hal ini disebabkan selain penetapan target yang tinggi juga disebabkan kegiatan OPD pada akhir tahun banyak dilakukan dikantor untuk efisiensi anggaran.

Pendapatan ini terdiri dari:

Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
<b>Retribusi Pemakaian Ruang :</b>	<b>580.533.371,00</b>	<b>377.100.000,00</b>	<b>64,96</b>	<b>267.950.000,00</b>
- Retribusi Sewa Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00	3.200.000,00
- Retribusi Sewa Pemakaian Aula Istana Bung Hatta (Besar/Kecil)	552.933.371,00	341.000.000,00	61,67	254.250.000,00
- Retribusi Sewa Pemakaian Aula Mess Bukit Lampu	14.000.000,00	22.500.000,00	160,71	10.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>580.533.371,00</b>	<b>377.100.000,00</b>	<b>64,96</b>	<b>267.950.000,00</b>

Penerimaan pendapatan Biro Umum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
Belanja Pegawai	62.858.145.559,00	58.656.948.405,00	93,32	56.504.655.204,00

a. Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Untuk realisasi Tahun 2024 mencapai 93,32 % dari anggarannya. Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.201.197.154,00 disebabkan karena adanya mutasi pegawai dan banyak pegawai yang pensiun pada tahun 2024. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp. 2.152.293.201,00. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Belanja pegawai ini terdiri dari, rincian objek belanja :

Belanja Tidak Langsung	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
• Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	26.362.202.223,00	26.009.862.157,00	98,66	23,969,836,123.00
- Gaji Pokok ASN	18.950.725.223,00	18.781.591.042,00	99,11	17,886,447,472.00
- Gaji Pokok PNS	18.862.267.010,00	18.694.303.842,00	99,11	17,886,447,472.00
- Gaji Pokok PPPK	88.458.213,00	87.287.200,00	98,68	0,00
- Tunjangan Keluarga ASN	1.813.800.000,00	1.802.703.608,00	99,39	1,722,716,768.00
- Tunjangan Keluarga PNS	1.806.000.000,00	1.794.920.168,00	99,39	1,722,716,768.00
- Tunjangan Keluarga PPPK	7.800.000,00	7.783.440,00	99,79	0,00
- Tunjangan Jabatan ASN	1.014.000.000,00	982.360.000,00	96,88	1,490,288,800.00
- Tunjangan Jabatan PNS	1.014.000.000,00	982.360.000,00	96,88	1,490,288,800.00
- Tunjangan Fungsional ASN	1.125.900.000,00	1.118.364.470,00	99,33	318,367,000.00

- Tunjangan Fungsional PNS	1.113.000.000,00	1.105.491.470,00	99,33	318,367,000.00
- Tunjangan Fungsional PPPK	12.900.000,00	12.873.000,00	99,79	0,00
- Tunjangan Fungsional Umum ASN	517.000.000,00	508.065.000,00	98,27	550,260,000.00
- Tunjangan Fungsional Umum PNS	516.000.000,00	508.065.000,00	98,46	550,260,000.00
- Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Tunjangan Beras ASN	978.100.000,00	973.614.480,00	99,54	1,004,899,120.00
- Tunjangan Beras PNS	973.000.000,00	968.545.080,00	99,54	1,004,899,120.00
- Tunjangan Beras PPPK	5.100.000,00	5.069.400,00	99,40	0,00
- Tunjangan PPh/Potongan Khusus ASN	249.000.000,00	245.208.058,00	98,48	98,040,275.00
- Tunjangan PPh/Potongan Khusus PNS	249.000.000,00	245.208.058,00	98,48	98,040,275.00
- Pembulatan Gaji ASN	277.000,00	255.556,00	92,26	253,924.00
- Pembulatan Gaji PNS	275.000,00	253.561,00	92,20	253,924.00
- Pembulatan Gaji PPPK	2.000,00	1.995,00	99,75	0,00
- Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.555.350.000,00	1.443.532.252,00	92,81	751,991,735.00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.551.000.000,00	1.439.214.512,00	92,79	751,991,735.00
- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.350.000,00	4.317.740,00	99,26	0,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan ASN	40.215.000,00	38.541.761,00	95,84	36,642,623.00
- Iuran Jaminan Kecelakaan PNS	40.000.000,00	38.332.265,00	95,83	36,642,623.00
- Iuran Jaminan Kecelakaan PPPK	215.000,00	209.496,00	97,44	0,00

- Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN	117.635.000,00	115.625.930,00	98,29	109,928,406.00
- Iuran Jaminan Kematian Kerja PNS	117.000.000,00	114.997.463,00	98,29	109,928,406.00
- Iuran Jaminan Kematian Kerja PPPK	635.000,00	628.467,00	98,97	0,00
- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	200.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	200.000,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Tambahan Penghasilan ASN	29.384.452.857,00	26.174.090.486,00	89,07	27,809,473,000.00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja ASN	18.000.357.250,00	16.511.430.865,00	91,73	17,585,642,065.00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja PNS	17.900.000.000,00	16.511.430.865,00	92,24	17,585,642,065.00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja PPPK	100.357.250,00	0,00	0,00	0,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	11.309.095.607,00	9.596.417.894,00	84,86	10.173.536.538,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	11.272.252.444,00	9.596.417.894,00	85,13	10.173.536.538,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	36.843.163,00	0,00	0,00	0,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	75.000.000,00	66.241.727,00	88,32	50.294.397,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	75.000.000,00	66.241.727,00	88,32	50.294.397,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
• Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.370.843.644,00	1.098.944.173,00	80,17	315,436,000.00
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.029.165.564,00	771.874.173,00	75,00	0,00
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	692.957.758,00	496.580.997,00	71,66	0,00

- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	318.928.117,00	262.906.968,00	82,43	0,00
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	17.279.689,00	12.386.208,00	71,68	0,00
- Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	10.718.080,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	10.718.080,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Honorarium	330.960.000,00	327.070.000,00	98,82	315,436,000.00
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	330.960.000,00	327.070.000,00	98,82	308,636,000.00
• Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.692.199.376,00	1.325.604.130,00	78,34	243,027,548.00
- Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.173.336,00	75.600.000,00	96,71	75,600,000.00
- Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.173.336,00	75.600.000,00	96,71	75,600,000.00
- Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.000.000,00	10.584.000,00	96,22	10,584,000.00
- Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.000.000,00	10.584.000,00	96,22	10,584,000.00
- Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	137.000.000,00	136.080.000,00	99,33	136,080,000.00
- Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	137.000.000,00	136.080.000,00	99,33	136,080,000.00
- Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.690.400,00	8.111.040,00	93,33	8,111,040.00
- Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.690.400,00	8.111.040,00	93,33	8,111,040.00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.420.750,00	7.019.330,00	94,59	4,408,908.00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.420.750,00	7.019.330,00	94,59	4,408,908.00
- Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	1.040,00	92,86	1,040.00
- Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	1.040,00	92,86	1,040.00

- Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.208.190,00	7.620.480,00	82,76	7,620,480.00
- Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.208.190,00	7.620.480,00	82,76	7,620,480.00
- Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	187.675,00	155.520,00	82,87	155,520.00
- Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	187.675,00	155.520,00	82,87	155,520.00
- Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	563.025,00	466.560,00	82,87	466,560.00
- Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	563.025,00	466.560,00	82,87	466,560.00
- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.439.954.880,00	1.079.966.160,00	75,00	0,00
- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	969.550.420,00	694.790.280,00	71,66	0,00
- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	446.227.617,00	367.845.744,00	82,43	0,00
- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	24.176.843,00	17.330.136,00	71,68	0,00
• Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.048.447.459,00	4.048.447.459,00	100,00	4,166.882.533.00
- Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.048.447.459,00	4.048.447.459,00	100,00	4,166.882.533.00
- Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.048.447.459,00	4.048.447.459,00	100,00	4,166.882.533.00
<b>Jumlah.....</b>	<b>62.858.145.559,00</b>	<b>58.656.948.405,00</b>	<b>93,32</b>	<b>56.504.655.204,00</b>

Saldo / jumlah belanja tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangi pengembalian belanja pegawai selama tahun 2024 sejumlah Rp. 48.859.425,00 yang terdiri dari :

- Belanja Gaji Pokok ASN Rp. 28.386.200,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 20.473.225,00

Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
<b>Belanja Barang &amp; Jasa</b>	<b>54.190.167.697,00</b>	<b>51.600.136.384,00</b>	<b>95,22</b>	<b>55,853,818,549.00</b>

**b. Belanja Barang & Jasa**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang & Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Untuk realisasi Tahun 2024 mencapai 95,22 % dari anggarannya, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terdapat penurunan sebesar Rp 4.253.682.165,00 Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari:

<b>Belanja Barang</b>	<b>16.685.000.551,00</b>	<b>16.134.839.680,00</b>	<b>96,70</b>	<b>15,928,954,031.00</b>
<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>16.497.481.051,00</b>	<b>15.954.983.680,00</b>	<b>96,71</b>	<b>15,928,954,031.00</b>
Belanja Bahan-Bahan Kimia	103.690.000,00	103.590.000,00	99,90	87,140,000.00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.859.189.270,00	2.619.483.699,00	91,62	2,757,970,122.00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	12.434.800,00	3.533.800,00	28,42	875,000.00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	44.860.000,00	44.860.000,00	100,00	39,140,000.00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	36.120.000,00	34.020.000,00	94,19	35,070,000.00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	118.671.250,00	118.381.250,00	99,76	24,676,500.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	318.599.600,00	313.591.350,00	98,43	211,147,700.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	265.210.460,00	249.790.600,00	94,19	303,802,900.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	245.471.600,00	211.303.050,00	86,08	243,488,660.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	76.920.000,00	76.020.000,00	98,83	43,140,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	277.259.400,00	265.768.600,00	95,86	287,979,500.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.516.000,00	14.480.000,00	99,75	19,202,300.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	221.750.275,00	221.496.025,00	99,89	203,613,125.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	4,158,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.092.355.396,00	4.005.353.896,00	97,87	4,919,938,958.00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	780.000,00	720.000,00	92,31	780,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.844.000,00	51.150.000,00	76,52	69,135,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.181.179.000,00	6.151.609.610,00	99,52	5,392,181,266.00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	64,200,000.00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	343.410.000,00	343.410.000,00	100,00	436,095,000.00
Belanja Pakaian Dinas (PDH)	437.500.000,00	405.641.800,00	92,72	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	6,000,000.00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	16.352.500,00	16.352.500,00	100,00	0,00
Belanja Pipa-pipa Lainnya	16.352.500,00	16.352.500,00	100,00	0,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	171.167.000,00	163.503.500,00	95,52	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	171.167.000,00	163.503.500,00	95,52	0,00
<b>Belanja Jasa</b>	<b>23.616.470.551,00</b>	<b>21.973.912.700,00</b>	<b>93,04</b>	<b>25.027.614.724.00</b>
<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>19.915.199.577,00</b>	<b>18.614.144.311,00</b>	<b>93,47</b>	<b>22,597,086,754.00</b>
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	0,00	0,00	0,00	8,050,000.00

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	14,400,000.00
Honorarium Rohaniawan	0,00	0,00	0,00	200,000.00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	194.554.192,00	181.021.632,00	93,04	193,051,984.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	33.000.000,00	28.750.000,00	87,12	28,500,000.00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.091.026.844,00	4.058.331.445,00	99,20	3,705,153,425.00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.992.066.617,00	2.979.959.000,00	99,60	2,891,253,542.00
Belanja Jasa Tenaga Sopir	1.405.790.309,00	1.399.165.000,00	99,53	2,157,066,589.00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	5.287.094.506,00	4.739.156.593,00	89,64	3,399,664,655.00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	85.000.000,00	83.860.500,00	98,66	0,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	27.000.000,00	9.000.000,00	33,33	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	5,116,284,039.00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	439.825.000,00	437.995.842,00	99,58	373,624,030.00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	48.000.000,00	42.000.000,00	87,50	42,000,000.00
Belanja Tagihan Telepon	319.126.500,00	312.382.568,00	97,89	364,548,264.00
Belanja Tagihan Air	537.100.000,00	480.639.121,00	89,49	479,266,749.00
Belanja Tagihan Listrik	3.536.319.500,00	3.076.977.270,00	87,01	3,141,525,269.00
Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	66.581.960,00	64.005.329,00	96,13	65,262,981.00
Belanja Paket/Pengiriman	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	200.247.149,00	171.807.011,00	85,80	140,922,727.00

Belanja Lembur	518.217.000,00	497.093.000,00	95,92	466,252,000.00
Belanja Medical Check Up	80.000.000,00	0,00	0,00	10,060,500.00
<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>	<b>645.910.977,00</b>	<b>567.267.152,00</b>	<b>87,82</b>	<b>551,110,472.00</b>
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	183.306.499,00	148.555.697,00	81,04	163,123,900.00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	10.998.435,00	10.491.585,00	95,39	12,372,505.00
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	55.606.043,00	13.114.870,00	23,59	15,389,435.00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	396.000.000,00	395.105.000,00	99,77	360,224,632.00
<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.097.510.000,00</b>	<b>1.005.705.000,00</b>	<b>91,64</b>	<b>722,015,000.00</b>
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	594.600.000,00	529.600.000,00	89,07	440,400,000.00
Belanja Sewa Mebel	60.660.000,00	60.620.000,00	99,93	49,440,000.00
Belanja Sewa Alat Pendingin	50.000.000,00	46.500.000,00	93,00	31,700,000.00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	102.000.000,00	99.000.000,00	97,06	36.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	279.750.000,00	259.485.000,00	92,76	164,475,000.00
<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>377.850.000,00</b>	<b>312.880.064,00</b>	<b>82,81</b>	<b>358,469,157.00</b>
Belanja Sewa Taman	96.250.000,00	96.250.000,00	100,00	70,000,000.00
Belanja Sewa Hotel	281.600.000,00	216.630.064,00	76,93	288,469,157.00
<b>Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi</b>	<b>1.579.999.997,00</b>	<b>1.473.916.173,00</b>	<b>93,29</b>	<b>700,020,081.00</b>

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	841.400.000,00	808.802.703,00	96,13	254,019,291.00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	100.000.000,00	98.196.150,00	98,20	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	638.599.997,00	566.917.320,00	88,78	446,000,790.00
<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>	0,00	0,00	0,00	<b>98,913,260.00</b>
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	98,913,260.00
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.418.714.595,00</b>	<b>5.048.050.362,00</b>	<b>93,16</b>	<b>5,588,496,065.00</b>
<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>2.458.260.000,00</b>	<b>2.196.682.990,00</b>	<b>89,36</b>	<b>2,649,038,624.00</b>
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.875.520.000,00	1.700.487.585,00	90,67	1,856,677,324.00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	395.440.000,00	360.186.835,00	91,09	414,844,050.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	108.500.000,00	78.693.750,00	72,53	105,204,750.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	20,400,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	4.500.000,00	0,00	0,00	15,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangtan Pejabat	30.000.000,00	29.500.000,00	98,33	2,500,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	2.500.000,00	0,00	0,00	1,500,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	6.000.000,00	1.500.000,00	25,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	119,491,500.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.250.000,00	13.870.000,00	76,00	39,630,000.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	1,985,000.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	13.800.000,00	12.445.000,00	90,18	71,806,000.00
<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>2.960.454.595,00</b>	<b>2.851.367.372,00</b>	<b>96,32</b>	<b>2,939,457,441.00</b>
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.960.454.595,00	2.851.367.372,00	96,32	2,939,457,441.00
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.469.982.000,00</b>	<b>8.443.333.642,00</b>	<b>99,69</b>	<b>9,308.753.729,00</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.469.982.000,00	8.443.333.642,00	99,69	9,308.753.729,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.469.982.000,00	8.443.333.642,00	99,69	9,308.753.729,00

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2.590.031.313,00 adalah :

<b>Belanja Barang</b>	<b>550.160.871,00</b>
<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>542.497.371,00</b>
Belanja Bahan-Bahan Kimia	100.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	239.705.571,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8.901.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.100.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	290.000,00

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.008.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	15.419.860,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	34.168.550,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	900.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.490.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	36.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	254.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	87.001.500,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	60.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.694.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	29.569.390,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	-
Belanja Pakaian Dinas (PDH)	31.858.200,00
Belanja Pakaian KOPRI	-
Belanja Pakaian Adat Daerah	-
Belanja Pakaian Olahraga	-
<b>Belanja Jasa</b>	<b>1.642.557.851,00</b>
<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.301.055.266,00</b>
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-
Honorarium Rohaniawan	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.532.560,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-
Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.250.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	32.695.399,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.107.617,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	-
Belanja Jasa Tenaga Sopir	6.625.309,00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	547.937.913,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.139.500,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	18.000.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.829.158,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	6.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-
Belanja Tagihan Telepon	6.743.932,00
Belanja Tagihan Air	56.460.879,00
Belanja Tagihan Listrik	459.342.230,00
Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV/Berlangganan	2.576.631,00
Belanja Paket/Pengiriman	2.250.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	28.440.138,00
Belanja Lembur	21.124.000,00
Belanja Medical Check Up	80.000.000,00
<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>	<b>78.643.825,00</b>
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	34.750.802,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	506.850,00
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	42.491.173,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	895.000,00
<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>91.805.000,00</b>
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	65.000.000,00
Belanja Sewa Mebel	40.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	3.500.000,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	3.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	20.265.000,00

<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>64.969.936,00</b>
Belanja Sewa Taman	-
Belanja Sewa Hotel	64.969.936,00
<b>Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya</b>	<b>-</b>
Belanja Sewa Tanaman	-
<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>	<b>106.083.824,00</b>
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	32.597.297,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	1.803.850,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	71.682.677,00
<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>	<b>-</b>
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	-
<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>-</b>
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-
Belanja Bimbingan Teknis	-
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>370.664.233,00</b>
<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>261.577.010,00</b>
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	175.032.415,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	3.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	35.253.165,00

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	29.806.430,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	4.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari Arsip Pejabat	2.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	4.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.380.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.355.000,00
<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>109.087.223,00</b>
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	109.087.223,00
<b>Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>-</b>
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	-
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26.648.358,00</b>

<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	26.648.358,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.648.358,00
<b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	-

Saldo / jumlah belanja tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangi pengembalian belanja perjalanan dinas sejumlah Rp.630.000,00 dan belanja barang dan jasa yang dikapitalisir/dikoreksi menjadi aset tetap senilai Rp. 1.382.014.634,00 karena tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi sesuai rincian terlampir. (Lampiran 23)

**2. Belanja Modal**

<b>Perkiraan</b>	<b>Anggaran 2024</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>%</b>	<b>Tahun 2023</b>
<b>Belanja Modal</b>	<b>23.527.735.040,00</b>	<b>22.422.226.850,00</b>	<b>95,30</b>	<b>10,548,365,952.00</b>

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2024 dan 2023 . Realisasi tahun 2024 mencapai 95,30 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp. 11.873.860.898,00. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Aset tetap Lainnya. Rincian belanja modal tersebut yaitu :

<b>Perkiraan</b>	<b>Anggaran 2024</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>%</b>	<b>Tahun 2023</b>
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>16.407.411.365,00</b>	<b>15.491.721.013,00</b>	<b>94,42</b>	<b>6,614,034,675.00</b>

**a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 dan 2023. Realisasi tahun 2024 mencapai 94,42 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp. 8.877.686.338,00. Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

<b>BELANJA MODAL ALAT BESAR</b>	<b>99.344.000,00</b>	<b>85.576.000,00</b>	<b>86,14</b>	<b>79.152.000,00</b>
Belanja Modal Alat Bantu	99.344.000,00	85.576.000,00	86,14	79.152.000,00
Belanja Modal Alat Pompa	99.344.000,00	85.576.000,00	86,14	79.152.000,00
<b>BELANJA MODAL ALAT ANGKUTAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.900.000,00</b>
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	839.900.000,00

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Perorangan	0.00	0.00	0.00	799.600.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0.00	0.00	0.00	40.300.000,00
<b>BELANJA MODAL ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	<b>9.135.000,00</b>	<b>9.060.000,00</b>	<b>99,18</b>	<b>0,00</b>
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	9.135.000,00	9.060.000,00	99,18	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	9.135.000,00	9.060.000,00	99,18	0,00
<b>BELANJA MODAL ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	<b>4.072.399.635,00</b>	<b>3.764.473.415,00</b>	<b>92,44</b>	<b>4.081.199.150,00</b>
Belanja Modal Alat Kantor	2.568.373.196,00	2.376.979.240,00	92,55	1.351.259.350,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	145.450.000,00	131.903.000,00	90,69	86.498.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.422.923.196,00	2.245.076.240,00	92,66	1.264.761.350,00
<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>	<b>1.492.526.439,00</b>	<b>1.375.994.175,00</b>	<b>92,19</b>	<b>2.729.939.800,00</b>
Belanja Modal Mebel	408.633.764,00	333.058.500,00	81,51	236.290.200,00
Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	28.200.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	9.230.000,00	9.230.000,00	100,00	262.534.000,00
Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.074.662.675,00	1.033.705.675,00	96,19	2.197.115.600,00
<b>BELANJA MODAL MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	0,00
<b>BELANJA MODAL ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR</b>	<b>11.742.712.190,00</b>	<b>11.160.621.598,00</b>	<b>95,04</b>	<b>526.264.750,00</b>
<b>Belanja Modal Alat Studio</b>	<b>11.672.430.890,00</b>	<b>11.094.287.798,00</b>	<b>95,05</b>	<b>157.751.000,00</b>
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.171.890,00	6.170.000,00	99,97	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	140.668.500,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	11.666.259.000,00	11.088.117.798,00	95,04	17.082.500,00

<b>Belanja Modal Alat Komunikasi</b>	<b>70.281.300,00</b>	<b>66.333.800,00</b>	<b>94,38</b>	<b>368.513.750,00</b>
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	4.078.800,00	4.078.800,00	100,00	135.695.250,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	66.202.500,00	62.255.000,00	94,04	232.818.500,00
<b>BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>128.640.000,00</b>	<b>98,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Modal Alat Kesehatan Umum</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>128.640.000,00</b>	<b>98,95</b>	<b>0,00</b>
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	130.000.000,00	128.640.000,00	98,95	0,00
<b>BELANJA MODAL KOMPUTER</b>	<b>233.820.540,00</b>	<b>225.850.000,00</b>	<b>96,59</b>	<b>886.577.750,00</b>
<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>	<b>220.799.100,00</b>	<b>212.850.000,00</b>	<b>96,40</b>	<b>559.570.150,00</b>
Belanja Modal Personal Computer	220.799.100,00	212.850.000,00	96,40	368.206.150,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	191.364.000,00
<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>	<b>13.021.440,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>99,84</b>	<b>327.007.600,00</b>
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13.021.440,00	13.000.000,00	99,84	327.007.600,00
<b>BELANJA MODAL PERALATAN OLAHRAGA</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>117.500.000,00</b>	<b>97,92</b>	<b>200.941.025,00</b>
Belanja Modal Peralatan Olahraga	120.000.000,00	117.500.000,00	97,92	200.941.025,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	120.000.000,00	117.500.000,00	97,92	200.941.025,00
<b>JUMLAH</b>	<b>16.407.411.365,00</b>	<b>15.491.721.013,00</b>	<b>94,42</b>	<b>6,614,034,675,00</b>

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 1.105.508.190,00. Dengan rincain sebagai berikut :

<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>915.690.352,00</b>
<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	<b>13.768.000,00</b>
Belanja Modal Alat Bantu	13.768.000,00
Belanja Modal Pompa	13.768.000,00
<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>	<b>-</b>
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-

<b>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>75.000,00</b>
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	75.000,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	75.000,00
<b>BELANJA MODAL ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	<b>307.926.220,00</b>
<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>	<b>191.393.956,00</b>
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	13.547.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	177.846.956,00
<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>	<b>116.532.264,00</b>
Belanja Modal Mebel	75.575.264,00
Belanja Modal Alat Pembersih	-
Belanja Modal Alat Pendingin	-
Belanja Modal Alat Dapur	-
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.957.000,00
<b>BELANJA MODAL ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR</b>	<b>582.090.592,00</b>
<b>Belanja Modal Alat Studio</b>	<b>578.143.092,00</b>
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.890,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	578.141.202,00
<b>Belanja Modal Alat Komunikasi</b>	<b>3.947.500,00</b>
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	-
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	3.947.500,00
<b>BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>	<b>1.360.000,00</b>
<b>Belanja Modal Alat Kesehatan Umum</b>	<b>1.360.000,00</b>
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.360.000,00
<b>BELANJA MODAL KOMPUTER</b>	<b>7.970.540,00</b>
<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>	<b>7.949.100,00</b>
Belanja Modal Personal Computer	7.949.100,00
Belanja Modal Computer Unit Lainnya	-
<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>	<b>21.440,00</b>
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	21.440,00

BELANJA MODAL PERALATAN OLAHRAGA	2.500.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.500.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	2.500.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.105.508.190,00</b>

Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
Belanja Gedung dan Bangunan	7.061.065.675,00	6.887.606.581,00	97,54	3.884.396.887,00

**b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 dan 2023. Realisasi tahun 2024 mencapai 97,54 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.003.209.694,00. Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.061.065.675,00	6.887.606.581,00	97,54	3.884.396.887,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.061.065.675,00	6.887.606.581,00	97,54	3.884.396.887,00
<b>JUMLAH</b>	<b>7.061.065.675,00</b>	<b>6.887.606.581,00</b>	<b>97,54</b>	<b>3.884.396.887,00</b>

Sisa Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah **Rp. 173.459.094,00** sebagai berikut :

<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>173.459.094,00</b>
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	173.459.094,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>173.459.094,00</b>

Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00

**c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2024 dan 2023. Realisasi tahun 2024 mencapai 00,0 % dari anggarannya. Sedangkan tahun 2023 belanja modal ini tidak dianggarkan.

Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

<b>BELANJA MODAL INSTALASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	59.258.000,00	42.899.256,00	72,39	49.934.390,00

**d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 dan 2023. Realisasi tahun 2023 mencapai 72,39 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp. 7.035.134,00

Adapun rincian objek belanja modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

<b>BELANJA MODAL BAHAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>50.058.000,00</b>	<b>33.699.256,00</b>	<b>67,32</b>	<b>49.934.390,00</b>
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	50.058.000,00	33.699.256,00	67,32	49.934.390,00
Belanja Modal Buku Umum	23.278.000,00	16.853.301,00	72,40	23.238.768,00
Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	26.780.000,00	16.845.955,00	62,90	26.695.622,00
<b>Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Musik	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>59.258.000,00</b>	<b>42.899.256,00</b>	<b>72,39</b>	<b>49.934.390,00</b>

Sisa Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp. 16.358.744,00 Adalah sebagai berikut :

<b>BELANJA MODAL BAHAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>16.358.744,00</b>
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	16.358.744,00

Belanja Modal Buku Umum	6.424.699,00
Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	9.934.045,00
<b>Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</b>	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00
Belanja Modal Alat Musik	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>16.358.744,00</b>

## 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

### 5.2.1. Aset

#### Aset Lancar

Perkiraan	2024	2023
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### 1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023. Sampai dengan 31 Desember 2024, sisa UYHD sebesar Rp. 727.781.680,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2024. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2024.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	133.456.582.744,00	133.456.582.744,00	0.00

Penambahan adalah jumlah SP2D UP ditambah GU di Bendahara Pengeluaran.

Pengurangan adalah jumlah belanja sampai bulan Desember ditambah sisa UYHD /pajak yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2024.

Perkiraan	2024	2023
<b>Kas di Bendahara Penerima</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### 2. Kas di Bendahara Penerima

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023. Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2024.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	377.100.000,00	377.100.000,00	0,00

Penambahan adalah jumlah pendapatan selama tahun 2024 dari pendapatan retribusi daerah yaitu sewa aula Istana Bung Hatta, kamar dan aula Mess Bukit Lampu.

Pengurangan adalah semua pendapatan yang diterima langsung disetorkan ke Kas Daerah pada saat STS dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan.

Perkiraan	2024	2023
<b>Beban Jasa Dibayar Dimuka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. Beban Jasa Dibayar Dimuka

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023, yaitu beban jasa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi barang milik daerah.

Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) pembayaran premi yaitu pertama premi asuransi kendaraan bermotor nilai polis Rp. 195.860.000,00 jangka waktu 31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2024, penambahan dan pengurangan beban jasa dibayar muka menjadi Rp. 97.930.000,00. Premi yang kedua asuransi gedung kantor nilai polis Rp. 199.245.000,00 dengan jangka waktu 31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2024, penambahan dan pengurangan beban jasa dibayar muka menjadi Rp. 99.622.500,00. penambahan dan pengurangan beban jasa dibayar muka menjadi Rp.197.552.500,00.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban jasa dibayar dimuka	0,00	197.552.500,00.	197.552.500,00.	0,00

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11.

Perkiraan	2024	2023
<b>Persediaan</b>	<b>28.041.650,00</b>	<b>10.965.100,00</b>

### 4. Persediaan

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023, yaitu :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Bahan-Bahan Kimia	312.000	103.590.000,00	103.278.000,00	624.000
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	911.900	313.591.350,00	304.270.050,00	10.233.200
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.078.300	249.790.600,00	248.847.700,00	3.021.200

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.845.300	211.303.050,00	212.545.850,00	1.602.500
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000	76.020.000	75.850.000,00	290.000
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.272.600	265.768.600,00	259.701.900,00	9.339.300
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.425.000	4.005.353.896,00	4.003.847.446,00	2.931.450
<b>Jumlah</b>	<b>10.965.100</b>	<b>5.225.417.496,00</b>	<b>5.208.340.946,00</b>	<b>28.041.650,00</b>

Penambahan adalah jumlah belanja persediaan selama tahun 2024 sedangkan pengurangan adalah seluruh pemakaian tahun 2024.

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

**Aset Tetap**

Perkiraan	2024	2023
Tanah	370.972.587.000,00	370.972.587.000,00

**5. Tanah**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023.

**1) Dasar Penilaian**

A	Neraca Awal 2005	Rp.	166.803.310.000,00
B	Harga Perolehan 2006 sd 2024	Rp	200.553.477.000,00
C	Appraisal 2011	Rp	0,00
D	Apraisal 2012	Rp	3.615.800.000,00
E	Apraisal 2013	Rp	0,00
F	Apraisal 2015	Rp	0,00

Daftar Tanah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan

Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	370.972.587.000,00	0,00	0,00	370.972.587.000,00

<b>Saldo Audited 2023</b>	<b>370.972.587.000,00</b>
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	
Belanja Modal tahun 2024	0.00
Belanja Barang dan Jasa tahun 2024	0.00
Koreksi Tambah Nilai	0,00
Kurang catat/tidak tercatat	0.00
Hibah dari Pihak Ketiga	0.00
Mutasi antar SKPD	0.00
Reklasifikasi	0.00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>370.972.587.000,00</b>
<b><u>Mutasi Kurang</u></b>	
Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	0.00
Koreksi Kurang Nilai	0,00
Double Record/Aset Pusat	0.00
Hibah Kepada Pihak Ketiga	0.00
Mutasi antar SKPD	0.00
Reklasifikasi	0.00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo per 31 Des 2024</b>	<b>370.972.587.000,00</b>

**Penjelasan Mutasi Tambah**

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Tanah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2024	2023
Peralatan dan Mesin	87.632.432.516,05	72.709.545.353,05

**6. Peralatan dan Mesin**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Umum Sekretariat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 .

**1) Dasar Penilaian**

a	Neraca Awal 2005	Rp.	2.928.398.000,00
b	Harga Perolehan 2006 sd 2024	Rp	84.536.384.516,05
c	Appraisal 2011	Rp	0,00
d	Apraisal 2012	Rp	167.650.000.00
e	Apraisal 2013	Rp	0,00
f	Apraisal 2015	Rp	0,00

Daftar Peralatan dan Mesin Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	72.709.545.353,05	16.354.317.163,00	1.431.430.000,00	87.632.432.516,05
AkmPeny Peralatan & Mesin	57.276.038.233,80	6.669.763.191,42	1.431.430.000,00	62.514.371.425,22
Nilai Buku	15.433.507.119,25	9.684.553.971,58	0,00	25.118.061.090,83

<b>Saldo Audited 2023</b>	<b>72.709.545.353,05</b>
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	
Belanja Modal tahun 2024	15.491.721.013,00
Belanja Barang dan Jasa	102.396.150,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Mutasi antar SKPD	760.200.000,00
Reklasifikasi	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>16.354.317.163,00</b>
<b><u>Mutasi Kurang</u></b>	
Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	0,00
Koreksi saldo awal	0,00
Mutasi antar SKPD	1.431.430.000,00
Double Record	0,00
Reklasifikasi	0,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>1.431.430.000,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>14.922.887.163,00</b>
<b>Saldo per 31 Des 2024</b>	<b>87.632.432.516,05</b>

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 15.491.721.013,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 760.200.000,00 yang terdiri dari :
  1. Mutasi dari Badan Penghubung berupa 1 unit kendaraan roda empat Fortuner tahun 2014 senilai Rp.477.900.000,00 dengan BAST nomor : 030/PBMD/BPKAD/2024 tanggal 26 Januari 2024.
  2. Mutasi dari Badan Pendapatan Daerah berupa 1 unit Tablet merk Samsung Galaxy Tab S8 senilai Rp. 20.000.000,00 dan 1 unit Laptop merk HP senilai Rp. 16.800.000 dengan BAST nomor : 030 /287/BAST/BAPENDA/2024 tanggal 4 Maret 2024.

3. Mutasi dari Pengelola Barang Milik Daerah berupa 1 Unit Kendaraan roda empat Innova Tahun 2012 senilai Rp 245.500.000,00 dengan BAST nomor : 030/383/PBMD/BPKAD/2024 tanggal 6 November 2024.

c) Belanja barang dan jasa yang dikapitalisir terdiri dari :

1. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan senilai Rp.98.196.150,00 berupa pekerjaan perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal Videotron.
2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor senilai Rp.4.200.000,00. Berupa tangki air senilai Rp. 2.350.000,00 dan pompa air senilai Rp. 1.850.000,00.

**Penjelasan Mutasi Kurang**

a) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 1.431.430.000,00 yang terdiri dari :

- Mutasi ke Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat berupa 1 set kursi tamu senilai Rp.16.316.000,00 dan kursi kerja Eselon IV senilai Rp. 16.500.000,00 dan kursi rapat senilai Rp. 11.875.000 sesuai dengan BAST nomor : 01/V/B.A/BiroUmum/2024 tanggal 1 Mei 2024.
- Mutasi Biro Perekonomian berupa 1 set meja makan senilai Rp 24.500.000,00 dan 1 set kursi tamu senilai Rp.118.250.000,00 sesuai dengan BAST nomor: 02/V/B.A/BiroUmum/2024 tanggal 1 Mei 2024.
- Mutasi ke Dinas Kebudayaan berupa 1 meja rapat senilai Rp. 21.539.000,00 dan 10 unit kursi rapat senilai Rp.3.575.000,00 sesuai dengan BAST nomor : 14/NPD-Sekrt/BPKAD/2024 tanggal 13 Februari 2024.
- Mutasi ke Badan Penghubung berupa 1 unit kendaraan dinas Honda Accord senilai Rp. 635.765.000,00 sesuai BAST nomor : 08/X/B.A-Umum-2024 tanggal 25 November 2024.
- Mutasi ke Dinas Pendidikan berupa kendaraan roda empat Mini bus Isuzu tahun2012 senilai Rp.583.110.000,00 sesuai BAST nomor : 005/XI/B.Acara-Umum-2024 tanggal 14 Oktober 2024.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2024	2023
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>249.737.632.801,01</b>	<b>241.570.407.736,01</b>

**7. Gedung dan Bangunan**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Umum Sekretariat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023.

**1) Dasar Penilaian**

a	Neraca Awal 2005	Rp.	22.306.369.317,04
b	Harga Perolehan 2006 sd 2024	Rp	226.340.880.203,97
c	Apraisal 2011	Rp	0,00
d	Apraisal 2012	Rp	1.090.383.280,00
e	Apraisal 2013	Rp	0,00
f	Apraisal 2015	Rp	0,00

Daftar Gedung dan Bangunan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	241.570.407.736,01	8.167.225.065,00	0,00	249.737.632.801,01
Akm Peny Gedung & Bangunan	55.238.211.429,98	4.975.073.213,39	0,00	60.213.284.643,37
Nilai Buku	186.332.196.306,03	3.192.151.851,61	0,00	189.524.348.157,64

<b>Saldo Audited 2023</b>	<b>241.570.407.736,01</b>
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	
Belanja Modal tahun 2024	6.887.606.581,00
Belanja Barang dan Jasa	1.279.618.484,00
Mutasi antar SKPD	0,00
Reklasifikasi	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>8.167.225.065,00</b>
<b><u>Mutasi Kurang</u></b>	
Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	0,00
Reklasifikasi	0,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>8.167.225.065,00</b>
<b>Saldo per 31 Des 2024</b>	<b>249.737.632.801,01</b>

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 6.887.606.581,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- Belanja Barang Jasa yang dikapitalisir senilai Rp. 1.279.618.484,00 berupa belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang menambah nilai aset.

Perkiraan	2024	2023
Aset Tetap Lainnya	1.840.535.866,00	1.797.636.610,00

## 8. Aset Tetap Lainnya

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Umum Sekretariat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023.

### 1) Dasar Penilaian

a	Neraca Awal 2005	Rp.	0,00
b	Harga Perolehan 2006 sd 2024	Rp	1.840.535.866,00
c	Appraisal 2011	Rp	0,00
d	Apraisal 2012	Rp	0,00
e	Apraisal 2013	Rp	0,00
f	Apraisal 2015	Rp	0,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

### 2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	1.797.636.610,00	42.899.256,00	0,00	1.840.535.866,00
Akm Peny Aset Tetap Lainnya	634.320.280,32	33.694.706,67	0,00	668.014.986,99
Nilai Buku	1.163.316.329,68	9.204.549,73	0,00	1.172.520.879,41

**Saldo Audited 2023**

**1.797.636.610,00**

#### Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2024	42.899.256,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Reklasifikasi	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>42.899.256,00</b>

#### Mutasi Kurang

Mutasi antar SKPD	0,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Reklasifikasi	0,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0,00</b>

**Total Mutasi** 42.899.256,00

**Saldo per 31 Des 2024**

**1.840.535.866,00**

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 49.934.390,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2024	2023
Konstruksi dalam Pengerjaan	296.496.000,00	296.496.000,00

**9. Konstruksi dalam Pengerjaan**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar di Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023.

- a) Dasar penilaian Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp. 296.496.000,00 tersebut berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2024.

**Mutasi Tambah-Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Konstruksi Dalam Pengerjaan	296.496.000,00	158.969.760,00	158.969.760,00	296.496.000,00

<b>Saldo Audited 2023</b>	<b>296.496.000,00</b>
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	
Belanja Barang dan Jasa	158.969.760,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>158.969.760,00</b>
<b><u>Mutasi Kurang</u></b>	
Belanja Barang dan Jasa	158.969.760,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>158.969.760,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo per 31 Des 2024</b>	<b>296.496.000,00</b>

Rekapitulasi mutasi tambah dan kurang Aset tetap- Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 17 dan Lampiran 20.

Perkiraan	2024	2023
Akumulasi Penyusutan	123.395.671.055,18	113.148.569.944,10

**10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin 62.514.371.425,22
- Akumulasi Penyusutan Gdg dan Bangunan 60.213.284.643,37
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 668.014.986,59

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut dibawah ini :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	57.276.038.233,80	6.669.763.191,42	1.431.430.000,00	62.514.371.425,22
Akm.Gedung dan Bangunan	55.238.211.429,98	4.975.073.213,39	0,00	60.213.284.643,37
Akm. Aset Tetap Lainnya	634.320.280,32	33.694.706,67	0,40	668.014.986,59
<b>Total</b>	<b>113.148.569.944,10</b>	<b>11.678.531.111,48</b>	<b>1.431.430.000,40</b>	<b>123.395.671.055,18</b>

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tetap Lainnya
<b>SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2023 (NERACA )</b>	<b>57.276.038.233,80</b>	<b>55.238.211.429,98</b>	<b>634.320.280,32</b>
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	<b>741.800.000,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o Koreksi Saldo Awal	0,08	0,00	0,00
o Mutasi Antar SKPD	741.800.000,00	0,00	0,00
o Reklasifikasi	0,00	0,00	0,00
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	<b>1.431.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
o Koreksi Saldo Awal	0,0	0,00	0,40
o Mutasi antar SKPD	1.431.430.000,00	0,00	0,00
o Reklasifikasi	00,00	0,00	0,00
o Penghapusan	0,00	0,00	0,00
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2024	5.927.963.191,34	4.975.073.213,39	33.694.706,67
• <b>SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 24</b>	<b>62.514.371.425,22</b>	<b>60.213.284.643,37</b>	<b>668.014.986,59</b>

**Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan:**

**Penjelasan Mutasi Tambah**

1) Peralatan dan Mesin

- Koreksi saldo awal senilai Rp. 0.08
- Mutasi antar SKPD senilai Rp. 741.800.000,00 yang terdiri dari :
  1. Mutasi dari Badan Penghubung berupa 1 unit kendaraan roda empat Fortuner tahun 2014 senilai Rp.477.900.000,00 dengan BAST nomor : 030/PBMD/BPKAD/2024 tanggal 26 Januari 2024.
  2. Mutasi dari Badan Pendapatan Daerah berupa 1 unit Tablet merk Samsung Galaxy Tab S8 senilai Rp. 10.000.000,00 dan 1 unit Laptop merk HP senilai Rp. 8.400.000 dengan BAST nomor : 030 /287/BAST/BAPENDA/2024 tanggal 4 Maret 2024.
  3. Mutasi dari Pengelola Barang Milik Daerah berupa 1 Unit Kendaraan roda empat Innova Tahun 2012 senilai Rp 245.500.000,00 dengan BAST nomor : 030/383/PBMD/BPKAD/2024 tanggal 6 November 2024.

2) Beban Penyusutan Tahun 2024 :

- Beban penyusutan peralatan dan mesin Rp 5.927.963.191,34
- Beban penyusutan gedung dan bangunan Rp 4.975.073.213,39
- Beban penyusutan Aset tetap lainnya Rp 33.694.706,67

**Penjelasan Mutasi Kurang**

1) Peralatan dan Mesin

- Mutasi antar SKPD senilai Rp. 1.431.430.000,00 yang terdiri dari :
  - Mutasi ke Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat berupa 1 set kursi tamu senilai Rp.16.316.000,00 dan kursi kerja Eselon IV senilai Rp. 16.500.000,00 dan kursi rapat senilai Rp. 11.875.000 sesuai dengan BAST nomor : 01/V/B.A/BiroUmum/2024 tanggal 1 Mei 2024.
  - Mutasi Biro Perekonomian berupa 1 set meja makan senilai Rp 24.500.000,00 dan 1 set kursi tamu senilai Rp.118.250.000,00 sesuai dengan BAST nomor: 02/V/B.A/BiroUmum/2024 tanggal 1 Mei 2024.
  - Mutasi ke Dinas Kebudayaan berupa 1 meja rapat senilai Rp. 21.539.000,00 dan 10 unit kursi rapat senilai Rp.3.575.000,00 sesuai dengan BAST nomor : 14/NPD-Sekrt/BPKAD/2024 tanggal 13 Februari 2024.
  - Mutasi ke Badan Penghubung berupa 1 unit kendaraan dinas Honda Accord senilai Rp. 635.765.000,00 sesuai BAST nomor : 08/X/B.A-Umum-2024 tanggal 25 November 2024.
  - Mutasi ke Dinas Pendidikan berupa kendaraan roda empat Mini bus Isuzu tahun 2012 senilai Rp.583.110.000,00 sesuai BAST nomor : 005/XI/B.Acara-Umum-2024 tanggal 14 Oktober 2024.

- 2). Aset Tetap Lainnya  
Koreksi saldo awal senilai Rp.0,40.

**ASET LAINNYA**

Perkiraan	2024	2023
Aset Lainnya	331.489.607,00	331.489.607,00

**11. Aset Lain-Lain**

**1. Aset Tidak Bermanfaat**

Aset Tidak Bermanfaat tersebut dicatat berdasarkan nilai buku per 31 Desember 2024.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	331.489.607,00	0,00	0,00	331.489.607,00
Akm Penyusutan	81.649.017,00	0,00	0,00	81.649.017,00
Nilai Buku	249.840.590,00	0,00	0,00	249.840.590,00

<b>Saldo Audited 2023</b>	<b>331.489.607,00</b>
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	
Belanja Modal tahun 2024	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Reklasifikasi	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Mutasi Kurang</u></b>	
Penghapusan	0,00
Mutasi antar SKPD	0,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Reklasifikasi	0,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo per 31 Des 2024</b>	<b>331.489.607,00</b>

**KEWAJIBAN  
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Perkiraan	2024	2023
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

**11. Pendapatan Diterima Dimuka**

Jumlah tersebut merupakan pendapatan yang diterima dimuka dari lain-lain PAD yang sah tahun 2024 dan 2023.

Perkiraan	2024	2023
Utang Belanja	2.376.040.549,00	342.215.788,00

## 12. Utang Belanja

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2024 dan 2023. Utang belanja ini terdiri dari utang belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan rincian :

- Utang Belanja Pegawai Rp 2.039.220.864,00 Rp 10.980.933,00
- Utang belanja barang dan Jasa Rp 336.819.685,00 Rp 331.234.855,00

Yaitu utang belanja pegawai, belanja telepon, air dan listrik yang merupakan pemakaian bulan Desember 2024 yang dibayarkan bulan Januari .

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	342.215.788,00	2.376.040.549,00	342.215.788,00	2.376.040.549,00

Penambahan sebesar Rp. 2.376.040.549,00 adalah jumlah utang belanja pegawai dan belanja barang dan jasa tahun 2024 yang akan dibayarkan di tahun 2025. Utang Belanja pegawai yang timbul pada tahun 2024 merupakan pembayaran TPP bulan Desember 2024.

Pengurangan sebesar Rp. 342.215.788,00 adalah jumlah utang belanja pegawai dan belanja barang dan jasa di tahun 2023 yang telah dibayarkan tahun 2024.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

## EKUITAS

Perkiraan	2024	2023
Ekuitas	584.985.854.818,88	574.116.692.656,96

## 13. Ekuitas

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 . Ekuitas ini terdiri dari:

- Ekuitas Awal **574.116.692.656,96**
- Koreksi Ekuitas 15.249.551,32
- Surplus/Defisit LO (121.448.299.028,40)
- RK/PPKD 132.302.211.639,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN-LO

Perkiraan	2024	2023
<b>Pendapatan Retribusi Daerah –LO</b>	<b>377.100.000,00</b>	<b>267.950.000,00</b>

1. Pendapatan Retribusi Daerah –LO

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO dalam Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat penurunan sebesar Rp.109.150.000,00 .

Pendapatan ini terdiri dari:

No	Perkiraan	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
1.	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :- LO</b>			
	- Pemakaian Aula Istana Bung Hatta	341.000.000,00	61,67	254.250.000,00
	- Pemakaian Aula Kantor Gubernur			-
	- Pemakaian Aula Mess Bukit Lampu	22.500.000,00	160,71	10.500.000,00
	- Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu	13.600.000,00	100,00	3.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>377.100.000,00</b>	<b>64,96</b>	<b>267.950.000,00</b>

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2024	2023
<b>Beban Pegawai</b>	<b>60.685.188.336,00</b>	<b>56.515.636.137,00</b>

a. **Beban Pegawai**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO dan Uang Lembur-LO, yaitu :

<b>BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN - LO</b>	<b>26.009.862.157,00</b>	<b>23.969.836.123,00</b>
Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	<b>26.009.862.157,00</b>	<b>23.969.836.123,00</b>
Beban Gaji Pokok ASN - LO	18.781.591.042,00	17.886.447.472,00
Beban Gaji Pokok PNS - LO	18.694.303.842,00	17.886.447.472,00
Beban Gaji Pokok PPPK - LO	87.287.200,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN - LO	1.802.703.608,00	1.722.716.768,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS - LO	1.794.920.168,00	1.722.716.768,00

Beban Tunjangan Keluarga PPPK - LO	7.783.440,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN - LO	982.360.000,00	1.490.288.800,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS - LO	982.360.000,00	1.490.288.800,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN - LO	1.118.364.470,00	318.367.000,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS - LO	1.105.491.470,00	318.367.000,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK - LO	12.873.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN - LO	508.065.000,00	550.260.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS - LO	508.065.000,00	550.260.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK - LO	0,00	0,00
Beban Tunjangan Beras ASN - LO	973.614.480,00	1.004.899.120,00
Beban Tunjangan Beras PNS - LO	968.545.080,00	1.004.899.120,00
Beban Tunjangan Beras PPPK - LO	5.069.400,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Potongan Khusus ASN - LO	245.208.058,00	98.040.275,00
Beban Tunjangan PPh/Potongan Khusus PNS - LO	245.208.058,00	98.040.275,00
Beban Tunjangan PPh/Potongan Khusus PPPK - LO	0,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji ASN – LO	255.556,00	253.924,00
Beban Pembulatan Gaji PNS – LO	253.474,00	253.924,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK – LO	1.995,00	0,00
Beban luran Jaminan Kesehatan ASN - LO	1.443.532.252,00	751.991.735,00
Beban luran Jaminan Kesehatan PNS - LO	1.439.214.512,00	751.991.735,00
Beban luran Jaminan Kesehatan PPPK - LO	4.317.740,00	0,00
Beban luran Jaminan kecelakaan Kerja ASN – LO	38.541.761,00	36.642.623,00
Beban luran Jaminan kecelakaan Kerja PNS – LO	38.332.265,00	36.642.623,00
Beban luran Jaminan kecelakaan Kerja PPPK – LO	209.496,00	0,00
Beban luran Jaminan Kematian ASN – LO	115.625.930,00	109.928.406,00
Beban luran Jaminan Kematian PNS – LO	114.997.463,00	109.928.406,00
Beban luran Jaminan Kematian PPPK – LO	628.467,00	0,00
<b>BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS -LO</b>	<b>28.202.330.417,00</b>	<b>27.809.473.000,00</b>
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja – LO	18.550.651.729,00	17.585.642.065,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja – LO	9.592.326.386,00	10.173.536.538,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan kelangkaan profesi – LO	55.260.794,00	50.294.397,00
<b>BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA - LO</b>	<b>1.098.944.173,00</b>	<b>315.436.000,00</b>
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	771.874.173,00	0,00

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	496.580.997,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	262.906.968,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	12.386.208,00	0,00
Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Permukaan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00
Beban Honorarium	327.070.000,00	315.436.000,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	327.070.000,00	308.636.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	6.800.000,00
<b>BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN KDH/WKDH</b>	<b>1.325.604.130,00</b>	<b>243.027.548,00</b>
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600,00	75.600,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.584.000,00	10.584.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	136.080.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00	8.111.040,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.019.330,00	4.408.908,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.040,00	1.040,00
Beban luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.620.480,00	7.620.480,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00
Beban luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.079.966.160,00	0,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	694.790.280,00	0,00
Beban Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	367.845.744,00	0,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	17.330.136,00	0,00
<b>BEBAN PENERIMAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH</b>	<b>4.048.447.459,00</b>	<b>4.166.882.533,00</b>
- Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH	4.048.447.459,00	4.166.882.533,00
<b>Jumlah.....</b>	<b>60.685.188.336,00</b>	<b>56.515.636.137,00</b>

Perkiraan	2024	2023
Beban Barang & Jasa	50.203.479.581,00	54.927.392.583,00

**b. Beban Barang & Jasa**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

<b>BEBAN BARANG</b>	<b>16.117.763.130,00</b>	<b>15.928.954.031,00</b>
<b>Beban Barang Pakai Habis</b>	<b>15.937.907.130,00</b>	<b>15.928.954.031,00</b>
Beban Bahan-Bahan Kimia	103.278.000	87.140.000,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.619.483.699,00	2.757.970.122,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.533.800,00	875.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	44.860.000,00	39.140.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	34.020.000,00	35.070.000,00
Belanja Bahan-bahan Lainnya	118.381.250,00	24.676.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	304.270.050,00	211.147.700,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	240.771.200,00	303.067.100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	221.921.350,00	243.488.660,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	74.551.000,00	43.140.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	282.317.950,00	287.979.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.480.000,00	19.202.300,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	221.496.025,00	203.613.125,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	4.158.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.981.231.396	4.919.360.758,00
Beban Natura dan Pakan-Natura	720.000.000,00	780.000.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	51.150.000,00	69.135.000,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.151.609.610,00	5.392.181.266,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	64.200.000,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	343.410.000,00	436.095.000,00
Beban Pakaian Dinas (PDH)	405.641.800,00	0,00
Beban Pakaian KOPRI	1.500.000,00	6.000.000,00

<b>Beban Barang Tak Habis Pakai</b>	<b>16.352.500,00</b>	<b>0,00</b>
Beban Pipa-pipa Lainnya	16.352.500,00	0,00
<b>Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi</b>	<b>163.503.500,00</b>	<b>0,00</b>
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	163.503.500,00	0,00
<b>BEBAN JASA</b>	<b>25.642.382.809,00</b>	<b>25.027.614.724,00</b>
<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>18.616.578.692,00</b>	<b>22.597.086.754,00</b>
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	0,00	8.050.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	14.400.000,00
Beban Honorarium Rohaniawan	0,00	200.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	181.021.632,00	193.051.984,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	28.750.000,00	28.500.000,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.058.331.445,00	3.705.153.425,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.979.959.000,00	2.891.253.542,00
Beban Jasa Tenaga Sopir	1.399.165.000,00	2.157.066.589,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	4.739.156.593,00	3.399.664.655,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	83.860.500,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	9.000.000,00	0,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	40.000.000,00	5.116.284.039,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	437.995.842,00	373.624.030,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	42.000.000,00	42.000.000,00
Beban Tagihan Telepon	296.489.223,00	364.548.264,00
Beban Tagihan Air	478.419.934,00	479.059.698,00
Beban Tagihan Listrik	3.100.999.470,00	3.153.156.199,00
Beban Kawat/Faksimili/ Internet/TV/Berlangganan	60.530.042,00	65.262.981,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	171.807.011,00	140.922.727,00
Beban Lembur	497.093.000,00	466.252.000,00

Beban Medical Check Up	0,00	10.060.500,00
<b>Beban luran Jaminan/Asuransi</b>	<b>567.267.152,00</b>	<b>551.110.472,00</b>
Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	148.555.697,00	163.123.900,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	10.491.585,00	12.372.505,00
Beban luran Jaminan Kematian bagi non ASN	13.114.870,00	15.389.435,00
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	395.105.000,00	360.224.632,00
<b>Beban Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.005.705.000,00</b>	<b>722.015.000,00</b>
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	529.600.000,00	440.400.000,00
Beban Sewa Mebel	60.620.000,00	49.440.000,00
Beban Sewa Alat Pendingin	46.500.000,00	31.700.000,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	10.500.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Studio Lainnya	99.000.000,00	36.000.000,00
Beban Sewa Peralatan Umum	259.485.000,00	164.475.000,00
<b>Beban Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>312.880.064,00</b>	<b>358.469.157,00</b>
Beban Sewa Taman	96.250.000,00	70.000.000,00
Beban Sewa Hotel	216.630.064,00	288.469.157,00
<b>Beban Jasa Konsultansi Konstruksi</b>	<b>300.624.364,00</b>	<b>700.020.081,00</b>
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	157.872.384,00	254.019.291,00
Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	142.751.980,00	446.000.790,00
<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>	<b>0,00</b>	<b>98.913.260,00</b>
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	98.913.260,00
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>4.839.327.537,00</b>	<b>5.588.496.065,00</b>
<b>Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>2.196.682.990,00</b>	<b>2.649.038.624,00</b>
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.700.487.585,00	1.856.677.324,00

Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	360.186.835,00	414.844.050,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	78.693.570,00	105.204.750,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	20.400.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00	15.000.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	29.500.000,00	2.500.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.500.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio Lainnya	0,00	119.491.500,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.870.000,00	39.630.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0.00	1.985.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	12.445.000,00	71.806.000,00
<b>Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>2.642.644.547,00</b>	<b>2.070.752.100,00</b>
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.642.644.547,00	2.070.752.100,00
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>8.443.333.642,00</b>	<b>9.308.753.729,00</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>8.443.333.642,00</b>	<b>9.308.753.729,00</b>
Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.443.333.642,00	9.308.753.729,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg & Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
Beban Barang	16.134.839.680,00	16.117.763.130,00	(17.076.550,00)
Beban Jasa	21.973.912.700,00	20.803.055.272,00	(1.170.857.428,00)
Beban Pemeliharaan	5.048.050.362,00	4.839.327.537,00	(208.722.825,00)

Beban Perjalanan Dinas	8.443.333.642,00	8.443.333.642,00	(0,00)
Jumlah	51.600.136.384,00	50.203.479.581,00	(1.396.656.803,00)

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Bahan-Bahan Kimia	-	572.000,00	260.000,00	-	260.000,00	572.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	10.789.600,00	1.468.300,00	-	1.468.300,00	10.789.600,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	-	16.449.400,00	7.430.000,00	-	7.430.000,00	16.449.400,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	4.888.200,00	15.506.500,00	-	15.506.500,00	4.888.200,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	7.600.000,00	6.131.000,00	-	6.131.000,00	7.600.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	11.733.400,00	28.282.750,00	-	28.282.750,00	11.733.400,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	14.000.300,00	0,00	-	0,00	14.000.300,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	29.789.200,00	5.666.700,00	-	5.666.700,00	29.789.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>95.822.100</b>	<b>78.745.550,00</b>	<b>-</b>	<b>78.745.550,00</b>	<b>95.822.100</b>

- Penyesuaian pembayaran utang belanja barang dan jasa tahun 2023 dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2024 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Jasa Telepon		32.064.391,00	16.171.046,00	-	16.171.046,00	32.064.391,00
Belanja Jasa Air		42.756.898,00	40.537.711,00	-	40.537.711,00	42.756.898,00
Belanja jasa listrik		256.088.728,00	280.110.928,00	-	280.110.928,00	256.088.728,00
Belanja Jasa kawat/internet		3.475.287,00	0,00	-	0,00	3.475.287,00
<b>Jumlah</b>		<b>334.385.304,00</b>	<b>331.234.855,00</b>	<b>-</b>	<b>331.234.855,00</b>	<b>334.385.304,00</b>

Perkiraan	2024	2023
Beban Penyusutan dan Amortisasi	10.936.731.111,40	11.387.946.206,59

**c. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2024 dan Tahun 2023. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban penyusutan peralatan dan mesin Rp 5.927.963.191,34
- Beban penyusutan gedung dan bangunan Rp 4.975.073.213,39
- Beban penyusutan Aset tetap lainnya Rp 33.694.706,67

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada KIB B,C,E daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17.

**5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

Perkiraan	2024	2023
<b>Ekuitas</b>	<b>584.985.854.818,88</b>	<b>574.116.692.656,96</b>

1	Ekuitas Awal	574.116.692.656,96
2	Koreksi Ekuitas	15.249.551,32
3	RK PPKD	132.302.211.639,00
4	Surplus/Defisit LO	(121.448.299.028,40)
5	Ekuitas Akhir	584.985.854.818,88

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 574.116.692.656,96 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2023.
2. Koreksi Ekuitas
  - a. Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp.(0,08) karena adanya koreksi saldo awal.
  - b. Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap lainnya senilai Rp.0,40 karena adanya koreksi saldo awal.
  - c. Koreksi utang belanja barang dan jasa tahun 2023 senilai Rp. (3.150.449,00) karena adanya perbedaan pembayaran utang belanja barang dan jasa yang dibayarkan tahun 2024.
  - d. Koreksi peralatan dan mesin sebesar Rp. 18.400.000,00 karena adanya mutasi dari SKPD berupa laptop dan tablet.
3. RK PPKD sebesar Rp. 132.302.211.639,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2024 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Surplus/Defisit LO sebesar Rp (121.448.299.028,40) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2024.

**4.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.**

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

JENIS PENDAPATAN/ BELANJA	LRA	LO	Selisih
<b>Pendapatan Daerah</b>			
Pendapatan Pajak	-	-	-
Pendapatan Retribusi	377.100.000,00	377.100.000,00	-
Lain-lain PAD Yg Sah	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>377.100.000,00</b>	<b>377.100.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Belanja / Beban Operasi</b>			
Belanja Pegawai	58.656.948.405,00	60.685.188.336,00	2.028.239.931,00
Belanja Brg & Jasa	51.600.136.384,00	50.203.479.581,00	(1.396.656.803,00)
Belanja Modal	22.422.226.850,00	-	(22.422.226.850,00)
Beban Penyusutan & Amortisasi	-	10.936.731.111,40	10.936.731.111,40
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
<b>Jumlah Belanja / Beban Operasi</b>	<b>132.679.311.639,00</b>	<b>121.825.399.028,40</b>	<b>(10.853.912.610,60)</b>

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

**BAB VI**

**PENJELASAN UMUM ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

**6.1. Gambaran Umum SKPD Biro Umum**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Umum berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan Tugas pokok Biro Umum berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah “membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha”.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Umum melaksanakan fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha
2. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Umum memiliki peran yang strategis dalam memberikan atau memfasilitasi kegiatan Pimpinan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan cara mengoptimalkan SDM dan sarana dan prasarana yang ada ditambah dengan merekrut tenaga kontrak dalam memperlancar tugas dan fungsi pelayanan.

Sejalan dengan misi Gubernur Sumatera Barat pada periode RPJMD ke-IV (2021-2026) Biro Umum salah satu OPD yang mengampu pada Misi ke 7 yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas dengan tujuan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani pada sasaran ke tiga yaitu meningkatnya kualitas pelayanan public, maka Biro Umum memiliki peran strategis sebagai yang terdepan dalam:

- a. Terdepan dalam memberikan pelayanan kepada tamu Rumah tangga Pimpinan, pelayanan kepada pimpinan dan pelayanan administrasi keuangan setda. Untuk itu perlu menyikapinya dengan melakukan penguatan kapasitas SDM Biro Umum, sarana dan prasarana.
- b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Umum BB

- c. Salah satu OPD yang memiliki target pendapatan dalam bidang penerimaan retribusi daerah pemakaian kekayaan daerah.

6.2. Sumber Daya Manusia SKPD

SDM berdasarkan Pendidikan :

- S3	:	-
- S2	:	11 orang
- S1	:	19 orang
- D3	:	3 orang
- SMA	:	28 orang
- SMP	:	1 orang
- SD	:	-

SDM berdasarkan Golongan :

- IV	:	7 orang
- III	:	37 orang
- II	:	21 orang
- I	:	-

SDM berdasarkan Jenis Kepegawaian

- PNS	:	62 orang
- CPNS	:	-
- PTT	:	4 orang
- Tenaga Kontrak	:	131 orang
- Tenaga Sukarela	:	-

**BAB VII**

**PENUTUP**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Penyusunan dan penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2021.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara rinci yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Padang, Februari 2025

**KEPALA BIRO UMUM**

**Ir. EDI DHARMA S, M.Si**  
**Pembina Utama Muda / IV.c**  
**NIP. 19720713 199803 1 002**

**KATA PENGANTAR**

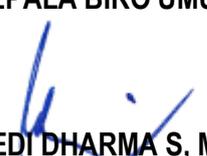
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirabbil'alamin, Laporan Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 telah dapat disiapkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan tersebut ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dan sekaligus menjadi bahan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2023 menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrual dengan laporan terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Operasional, 3) Laporan Perubahan Ekuitas, 4) Neraca, 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan laporan terstruktur dan terintegrasi satu sama lain mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi dalam hal ini adalah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun tujuan umum dari laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi keuangan dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi Kuasa Pengguna Anggaran dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara khusus tujuannya untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan.

Demikianlah laporan keuangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, Februari 2025

**KEPALA BIRO UMUM**

  
**Ir. EDI DHARMA S, M.Si**  
**Pembina Utama Muda / IV.c**  
**NIP. 19720713 199803 1 002**